

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
 Indikator Tujuan : Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Riau (WTP)
 Tugas : Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan Kebijakan Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset serta melaksanakan penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Sasaran)	Formula/ Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau	Waktu Penyampaian RAPBD – Waktu Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS sesuai Ketentuan	Bidang Anggaran Daerah
		Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau	Waktu Penetapan APBD Provinsi Riau sesuai Ketentuan	Bidang Anggaran Daerah
		Rata-rata waktu Pemrosesan Surat Perintah Membayar (SPM)	Berdasarkan Pasal 129 Ayat (6) Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) memproses SPM dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Paling lama 2 (dua) hari Sejak Tanggal diterimanya SPM	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Riau (WTP)	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
		Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi	$\frac{\text{Jumlah Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Yang Telah Diinventarisasi}}{\text{Jumlah Aset Tanah, Gedung dan Bangunan}} \times 100$	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Sasaran)	Formula/ Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Ranperda APBD}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau}} \times 100$	Bidang Anggaran Daerah
		Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau}} \times 100$	Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Pekanbaru, 1 Oktober 2019

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU**



SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19751001 199503 1 001